

### Efisiensi Pemerataan Kebijakan Moeneter Dalam Persepektif Syariah Dan Pengaruhnya Terhadap Tingkat Inflasi Di Indonesia

M. Radiansyah<sup>1\*</sup>, Munawaroh<sup>2</sup>, Aswin Fahmi D<sup>3</sup>, M. Guffar Harahap<sup>4</sup>

Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah<sup>\*1, 2, 3, 4</sup>

<sup>\*1</sup>email: [radiansdr@gmail.com](mailto:radiansdr@gmail.com)

<sup>2</sup>email: [nurohmurdin09@gmail.com](mailto:nurohmurdin09@gmail.com)

<sup>3</sup>email: [aswinfahmi@umnaw.ac.id](mailto:aswinfahmi@umnaw.ac.id)

<sup>4</sup>email: [medanguffar@gmail.com](mailto:medanguffar@gmail.com)

#### Artikel Info

Received:	Revised:	Accepted:	Published:
July 14, 2023	August 11, 2023	September 03, 2023	October 28, 2023

**Abstract:** Indonesia is one of the developing countries trying to face the obstacles for which monetary policy is present to see and measure how effective it is in affecting Indonesian inflation rates. Indonesia, as the country with the largest Muslim population, has begun to implement Islamic values in economic activities, including monetary policy. The aim of this study is to see to what extent the level of monetary policy efficiency from Islamic perspectives and its impact on inflation rates in Indonesia. The method used in this research is a library research method, and the data used is secondary data that corresponds to the relevant literature. Looking at the level of policy efficiency through Islamic perspectives and its influence on inflation rates shows that it has not yet reached an efficient point in controlling inflation levels, but Islamic policy coverage has a large scope.

**Abstrak:** Indonesia termasuk negara yang masih berkembang berupaya menghadapi rintangan untuk itu kebijakan moneter hadir untuk melihat dan meninjau sejauh mana keefektifannya dalam mempengaruhi tingkat inflasi di Indonesia. Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar tentunya mulai beranjak dan mengimplimentasikan nilai-nilai Islam dalam kegiatan berekonomi termasuk pada kebijakan moneter. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk melihat sejauh mana tingkat efisiensi pemerataan kebijakan moneter dalam perspektif Islam dan pengaruhnya terhadap tingkat inflasi di Indonesia. Metode yang digunakan pada penelitian ini ialah menggunakan metode library research dan data yang digunakan merupakan data sekunder yang jumlahnya sesuai dengan literatur yang relevan. Dalam melihat tingkat efisiensi kebijakan melalui perspektif Islam dan pengaruhnya terhadap tingkat inflasi menunjukkan bahwa masih belum mencapai titik efisien dalam

**Keywords :** Inflation; Islamic Monetary Policy; Efficiency

mengendalikan tingkat inflasi, namun cakupan kebijakan moneter Islam memiliki ruang lingkup yang besar.

**Kata Kunci :** Inflasi; Kebijakan Moneter Islam; Efisiensi

## A. Pendahuluan

Perekonomian Indonesia membutuhkan regulasi kebijakan yang mampu menciptakan stabilisasi dan ketahanan akan guncangan-guncangan ekonomi yang nantinya akan terjadi. Kebijakan moneter hadir dalam upaya mencapai stabilisasi permasalahan ekonomi terkhusus pengaruhnya terhadap inflasi. Sistem pemerataan kebijakan moneter ialah kebijakan yang dipergunakan dalam mempengaruhi perekonomian. Tujuan dari kebijakan moneter mendapatkan stabilitas ekonomi makro yang diantaranya dipengaruhi oleh stabilitas harga, peningkatan akan output riil, serta meluasnya kesempatan kerja.

Dalam sistem pemerataan kebijakan moneter BI setidaknya menggunakan enam aliran pemerataan kebijakan moneter diantaranya ialah uang, kredit, suku bunga, nilai tukar, harga aset dan ekspektasi. Enam sistem yang dikeluarkan BI memiliki tujuan untuk mencapai sasaran kebijakan moneter ialah, stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, dan juga untuk keseimbangan neraca pembayaran. Dalam proses pencapaian target BI membuat peraturan kebijakan moneter diantaranya ialah, adanya operasi pasar terbuka, fasilitas diskon, rasio cadangan wajib, serta imbalan moral.

Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 yang dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, maka secara hukum Indonesia sistem perbankan ganda sudah diterapkan, artinya bank konvensional dengan bank syariah bisa dioperasikan secara bersamaan. Perbankan ganda sendiri memiliki arti berlakunya sistem perbankan yang mengoperasikan sistem konvensional serta sistem syariah.

Di masa ini Indonesia masih termasuk pada negara berkembang, yang mana perkembangan akan ekonomi masih bersinggungan dengan inflasi. Melihat dari data tingkat inflasi Indonesia ditahun 2013-2019 bahwa sebagian besar tingkat inflasi masih belum mampu dikendalikan. Inflasi dilihat atas IHK (Indeks Harga Konsumen) ataupun juga indeks yang menggambarkan adanya harga yang berubah serta jasa yang dikonsumsi penduduk di waktu serta periode yang ditentukan.

Salah satu faktor tak ter kendalinya inflasi disebabkan oleh harga yang berubah mulai dari barang serta jasa selama proses transaksi, gejala alam, atau juga disebabkan oleh kebijakan pemerintah. Di tahun 2019 terjadi penurunan akan inflasi yang disebabkan oleh terpenuhinya pasokan akan produksi dengan permintaan pasar. Menurut Al-Arif (2010) menyatakan bahwa inflasi dalam perspektif Islam diakibatkan oleh kesalahan dari pihak pemerintah serta penawaran akan kesalahan manusia semacam tingkat konsumsi yang berlebih. Dampak yang diakibatkan oleh inflasi sendiri ialah mampu mengakibatkan menurunnya pendapatan riil penduduk pada akhirnya yang mengakibatkan standarisasi kehidupan penduduk kian melemah. Dan ketidaksinkronan ini menimbulkan ketidakpastian untuk para pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan ketika melakukan ekonomi baik itu produksi, konsumsi, ataupun investasi.

Dalam upaya mengatasi inflasi ini pemerintah membuat kebijakan yang dikenal dengan kebijakan moneter. Hal ini diaplikasikan ke dalam Bank Sentral untuk merangsang kegiatan ekonomi riil serta harga melalui kebijakan tersebut. Untuk itu Bank Sentral harus menetapkan target yang dicapai dalam upaya mengatasi permasalahan inflasi dan menetapkan arah pemerataan yang memiliki pengaruh terbesar dalam perekonomian sehingga dapat menjadi suatu regulasi yang ditetapkan dan diterapkan. Melalui judul “Efisiensi Pemerataan Kebijakan Moneter Dalam Perspektif Syariah Dan Pengaruhnya Terhadap Tingkat Inflasi Di Indonesia” dengan menggunakan metode library research untuk mengetahui bagaimana tingkat efisiensi pemerataan kebijakan moneter dalam perspektif syariah dalam mempengaruhi tingkat inflasi yang terjadi di Indonesia.

## **B. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif-analitis serta pendekatan kualitatif. Metode dan pendekatan tersebut digunakan untuk memaparkan kajian terkait kepustakaan mengenai efisiensi kebijakan moneter dalam perspektif syariah, dan pengaruhnya terhadap tingkat inflasi yang ada di Indonesia. Sumber serta teknik pengumpulan data didapatkan dari studi kepustakaan serta sumber literatur lainnya yang memiliki relevansi dengan bojek yang diteliti. Teknik analisis data dilakukan dengan deduktif dan induktif agar tercapainya penemuan rumusan konsptual terhadap efisiensi pemerataan kebijakan moneter syariah dan pengaruhnya terhadap tingkat inflasi di Indonesia. Dengan hasil penelitian ini harapannya mampu memperoleh kesimpulan akhir dalam memperkuat serta mengembangkan hasil dari penelitian sebelumnya yang masih relevan.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **Kebijakan Moneter**

Kebijakan moneter merupakan salah satu peran serta regulasi pemerintah dalam menindak lanjuti permasalahan perekonomian yang terjadi, kebijakan moneter dipergunakan sebagai alat dalam mengelola uang. Hal tersebut bisa dicermati dari pengelolaan akan permintaan dan penawaran dalam mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang diinginkan dan mencapai titik stabil. Kebijakan moneter yang dibuat oleh pemerintah dengan Bank Sentral sebagai perantaranya dengan cara mempengaruhi penciptaan uang. Dengan hal tersebut pemerintah dapat meninjau akan peredaran uang, pengeluaran investasi, permintaan agregat serta tingkat harga yang diharapkan dapat terjada kestabilannya.

Kebijakan moneter merupakan cakupan akan kebijakan ekonomi makro, untuk itu tujuan dari kebijakan moneter untuk bisa menjangkau pertumbuhan ekonomi, menyediakan lapangan kerja, menstabilkan harga serta mencapai keseimbangan neraca pembayaran. Dalam menjalani proses kebijakan tersebut, Bank Sentral membuat

beberapa instrumen kebijakan moneter yang terdiri dari adanya operasi pasar terbuka, cadangan wajib minimum, fasilitas diskonto, serta himbauan.

### **Kebijakan Moneter dalam Perspektif Syariah**

Islam menerapkan konsep bagi hasil dalam setiap kegiatan ekonominya, dan keuntungan yang didapatkan ditentukan oleh besar dalam membagikan laba yang telah diperoleh pihak bank dari setiap kegiatan ekonomi baik yang bersal dari hasil investasi atau dari hasil pembiayaan di sektor riil. Serta pendapatan yang diperoleh dari investasi serta pembiayaan tersebut yang nantinya membawa langkah terhadap pembagian besaran laba di sektor moneter.

Dalam padangan Islam, kebijakan moneter memiliki tujuan dalam memelihara stabilitas terhadap mata uang untuk mencapai meratanya pertumbuhan ekonomi. Dalam kebijakan moneter berdasarkan prinsip syariah menerapkan profit loss sharing, margin, dan fee dalam menggantikan instrumen suku bunga dikarekanakan pelaku ekonomi syariah yakin akan riba yang terkandung dalam suku bunga dalam pemerataan kebijakan moneter. Stabilitas dalam nilai uang diperoleh dari sebuah kerelaan, ketuisan, keterbukaan dalam muamalah.

Dalam perekonomian Islam instrumen yang dibangun dalam Bank Sentral tidak diketahui dalam sejar ekonomi Islam, karena dianggap tidak mencerminkan konsep Islami. Diakibatkan adanya keterhubungan akan seignorage atau pendapatan yang diterima dari hasil pencetakan uang, dalam hal ini nilai uang yang berhasil dicetak jauh lebih besar dibandingkan dengan nilai kertas ataupun biaya akan percetakan.

### **Inflasi**

Peningkatan harga barang dan jasa yang terjadi terus menerus disebut dengan inflasi. Menurut Tandelein (2010), inflasi dimaknai dengan cenderungnya dari nainya harga secara menyeluruh terhadap produk barang dan jasa selama periode tertentu. Inflasi terjadi ditandai dengan 3 unsur yang menandainya.

Pertama, adanya kenaikan akan harga walau dalam suatu waktu penurunan atau peningkatan akan terjadi sari yang sebelumnya. Kedua, terdapat kenaikan harga yang umum dan dialami oleh seluruh komoditas. Ketiga, diakibatkan oleh naiknya harga yang sedang terjad secara kontinu dengan kururn waktu yang cukup lama.

Inflasi sendiri tidak memiliki tempat dalam perkembangannya di teory ekonomi Islam. Dipergunakannya dinar serta dirham sebagai mata uang sampai inflasi tidak memiliki tempat dalam ekonomi Islam. Secara tidak langsung inflasi telah tertuang dalam AL-Qur'an, dan Hadits. Timbulnya keinginan penduduk dalam memiliki suatu barang dan jasa secara berlebih yang mengakibatkan timbulnya inflasi sebagai permasalahan ekonomi di masa ini.

Maka untuk menghindari adanya inflasi dan jauh sebelum hadirnya inflasi, Al-Qur'an maupun Hadits senantias memberi petunjuk sebagai berikut:

- Q.S. Ali-Imran (3): 14

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ  
وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ

Artinya : " Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diinginkannya, yaitu wanita-wanita, anakanak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang..."

- HR. Muslim

Artinya: "Sangatlah celaka orang yang diperhamba oleh harta (kapital), baik berupa uang mas (dinar), uang perak (dirham), atau lainnya."

Menurut pakar ekonom Islam inflasi dikelompokkan dalam beberapa hal diantaranya, natural inflation dan human error inflation. Natural inflation ialah inflasi yang diakibatkan adanya kejadian yang dialami manusia secara alami dan tidak memiliki control semacam menurunnya penawaran agregat (AD) dikarenakan uang yang diperoleh dan masuk dari nagar asing terlampau banyak. Sedangkan Human Error Inflation ialah inflasi yang diakibatkan adanya pola tingkah laku manusia semacam

korupsi, administrasi yang buruk, berlebihannya pajak, dan juga percetakan uang yang memiliki tujuan untuk mendapat keuntungan yang banyak.

### **Mekanisme Pemerataan Kebijakan Moneter**

Dalam menjangkau pemerataan kebijakan moneter dapat dilihat dari kegiatan riil. Taylor mengungkapkan bahwa mekanisme pemerataan ialah aliran yang menggabungkan antara kebijakan moneter dengan perekonomian. Mekanisme akan pemerataan kebijakan moneter telah dimulai ketika otoritas atau bank sentral mengambil tindakan dalam penggunaan instrumen moneter dalam mengimplementasikan kebijakan moneternya sehingga dapat dilihat pengaruh akan kegiatan perekonomian. Umumnya pemerataan kebijakan moneter terbagi dalam beberapa aliran diantaranya, aliran uang, aliran suku bunga, aliran kredit, aliran harga aset, serta aliran ekspektasi.

Sederhananya, mekanisme pemerataan kebijakan moneter merupakan aliran yang menggabungkan kebijakan moneter dengan perekonomian. Mekanisme pemerataan kebijakan moneter bergerak dengan mengimplementasikan kebijakan moneter sehingga dapat mempengaruhi akan kegiatan perekonomian, baik secara langsung atau bertahap. Dampak yang dihasilkan terhadap otoritas moneter dengan kegiatan perekonomian terjadi berdasarkan banyaknya channel, yang meliputi: aliran uang ataupun langsung, aliran suku bunga, kredit, nilai tukar, serta adanya aliran ekspektasi. Pada nyatanya, mekanisme pemerataan kebijakan moneter ialah kompleksitas, akibatnya dalam hal ekonomi moneter sering disebut dengan “black box”.

### **Mekanisme Pemerataan Kebijakan Moneter Syariah**

Dalam kegiatan sektor riil kebijakan moneter syariah berperan penting dalam menyokong hal tersebut. Untuk bisa menjangkau hal tersebut, uang serta lembaga perbankan menjadi bagian terpenting yang dipergunakan dalam mendapat tujuan pencapaian kebijakan moneter syariah. Chapra mengungkapkan, kebijakan moneter memiliki tujuan agar mendapatkan sosio ekonomi Islam.

Dalam mewujudkan tujuan yang diinginkan, diawali dari kebijakan yang sudah ditetapkan sampai pada tahap pencapaian target yang telah ditetapkan, dan hal tersebut menjadi sangat kompleks serta membutuhkan kurun waktu yang cukup lama. Otoritas bank yang bekerjasama dan menjadi mitra oleh pemerintah dalam menjalankan perubahan terhadap sistem moneter dan juga sasaran operasional yang diinginkan menyebar pengaruh dari bermacam variabel ekonomi serta keuangan. Berdasarkan interaksi antara bank sentral, lembaga perbankan serta sektor keuangan, dan juga sektor riil.

Dalam memperoleh target pasar hasil akhir, dan inflasi dalam menjangkau nasabah dengan mengimplementasikan konsep syariah dalam proses pemerataan kebijakan moneter memiliki sedikit perbedaan. Adapun cara yang bisa digunakan ialah dengan melaksanakan operasi moneter syariah dengan operasi pasar terbuka serta sistem SBIS. Kegiatan ini memiliki tujuan dalam mempengaruhi tingkat biaya perbankan syariah.

SBIS merupakan surat berharga yang dilandasi dengan prinsip syariah, yang memiliki jangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia dalam upaya meningkatkan efisiensi moneter dengan berlandaskan konsep syariah yang terus meningkat.

Dengan adanya pemerataan kebijakan moneter syariah ini, nantinya perkiraan dapat melindungi dari inflasi yang masih dalam tingkat moderat. Disebabkan sumber utama terjadinya inflasi ialah fiat money, selama mata uang kertas masih dipergunakan, apakah hal tersebut menggunakan mekanisme ekonomi kapitalis ataupun Islam akan tetap mendapat permasalahan inflasi.

### **Efisiensi Pemerataan Kebijakan Moneter Dalam Perspektif Syariah Dan Pengaruhnya Terhadap Tingkat Inflasi**

Efisiensi kebijakan moneter dalam mengatasi permasalahan inflasi ditandai dengan adanya banyak hal yang lebih memiliki power untuk mranngsang inflasi, jika dilihat dalam teory kebijakan moneter syariah inflasi dikendalikan dengan jalan penggunaan full bodied money, sistem 100 persen reserve banking system serta sistem

keuangan bagi hasil. Sistem bagi hasil sendiri sudah digunakan, tetapi terdapat beberapa kegiatan ekonomi dengan sistem bagi hasil yang terpacu akan konsep bunga. Dan hal ini menghilangkan fungsi akan bagi hasil karena secara tidak langsung tidak memiliki keterbedaan karena adanya unsur bunga. Lalu 100 persen reserve banking system ialah suatu konsep yang mana hasil dari sebuah konversi akan perbankan terhadap kesusleruhan depositonya yang nantinya akan dijadikan cadangan yang akan diberikan kepada bank sentral. Hal ini menimbulkan guncangan dalam menciptakan uang yang baru, akhirnya pemerintah sendiri belum memperoleh hasil yang tidak merata dari uang yang sudah diedarkan karena adanya seignorage. Akhirnya, minat beli tidak timbul, oleh sebab itu tidak adanya unsur ribawi di sistem ini dan tidak memicu efek inflasi.

Mekanisme ekonomi berdasarkan fiat money menimbulkan berbagai guncangan serta masalah. Mata uang kertas akan terus memicu timbulnya inflasi dikarenakan adanya nilai yang tidak sepadan dari waktu ke waktu sehingga akhirnya selisih antara mata uang kertas akan menimbulkan keuntungan di satu pihak. Hal ini dilihat dari peningkatan nilai dollar yang terjadi terus menerus sementara berbagai nilai tukar seperti mata uang termasuk rupiah mengalami kelemahan. Oleh sebab itu, implementasi akan full bodied money, ialah nilai intriksi sama terhadap nominal yang ada pada uang tersebut, dan hal tersebut dapat dijadikan suatu alternatif.

#### **D. Simpulan**

Kebijakan moneter ialah unsur terenting dalam kebijakan politik dalam sistem ekonomi, baik itu secara konvensional dan juga Islam. Sistem kebijakan moneter akan tercapai dengan melakukan pengawasan kepada keseluruhan sistem terhadap otoritas moneter. Dalam hal ini kebijakan moneter syariah memiliki beberapa instrumental dalam menghadapi inflasi seperti full bodied money, sistem 100 persen reserve banking system serta sistem keuangan bagi hasil. Dan dari hal tersebut dapat dilihat bahwa kebijakan moneter syariah merespon inflasi agak lebih lambat dan disesuaikan terhadap beberapa instrumen dalam penerapan di kebijakan moneter, kebijakan ekonomi moneter syariah sendiri membutuhkan jangka waktu yang cukup lama dalam proses

penstabilan inflasi namun untuk besarnya kebijakan ekonomi moneter syariah memiliki cakupan yang lebih besar.

### E. Daftar Pustaka

- Ascarya. (2012). Alur Transmisi Dan Efektifitas Kebijakan Moneter Ganda Di Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 14(3), 283–315. <https://doi.org/10.21098/bemp.v14i3.360>
- Ascarya, Achsani, N. A., & Hasanah, H. (2008). PERILAKU AGREGAT MONETER DALAM SISTEM KEUANGAN/PERBANKAN GANDA DI INDONESIA. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, 23(2).
- Assa, R. H., Rotinsulu, T. O., & Mandej, D. (2020). Analisis Kebijakan Moneter Terhadap Inflasi di Indonesia Periode : 2006.1 – 2019-2. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 20(01), 23–33.
- Astuti, R. D., & Hastuti, S. R. B. (2020). Transmisi Kebijakan Moneter Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 10(1), 1–22. <https://doi.org/10.35448/jequ.v10i1.8576>
- Bariah, I., Anam, N., Ghozi Mubarak, A., & Fatkur Rohman, S. (2020). Strategi Kebijakan Moneter Indonesia dalam Menghadapi Dampak Perang Dagang AS-China. *Humaniora*, 4(2), 155–167. <http://jurnal.abulyatama.ac.id/humaniora>
- Chapra, M. U. (2000). *Sistem Moneter Islam*. Gema Insani Press & Tazkia Cendikia.
- Daniar. (2016). Transmisi Kebijakan Moneter Syariah: Sebuah Analisa. *FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 90–102. <https://doi.org/10.22219/jes.v1i1.2700>
- Dwihapsari, R., Kurniaputri, M. R., & Nurul, H. (2021). Analisis Efektivitas Kebijakan Moneter Dalam Perspektif Konvensional dan Syariah Terhadap Inflasi di Indonesia Tahun 2013-2020. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(02), 980–993.
- Fuad, A. (2020). Kebijakan Moneter Islam. *Jurnal Syariah*, 8(1), 1–24. <http://www.ejournal.fiaiunisi.ac.id/index.php/syariah/article/view/280>
- Hadi, Z., Afifi, M., & Chaidir, T. (2016). ANALISIS TRANSMISI KEBIJAKAN MONETER MELALUI INSTRUMEN KONVENSIONAL DAN SYARIAH TERHADAP INFLASI DI INDONESIA PERIODE 2014.6-2019.12. *Jurnal Lentera Kajian Keagamaan, Keilmuan, Dan Teknologi*, 19(1), 109–129.

- Martanto, B., Tan, S., & Syurya Hidayat, M. (2021). Analisis tingkat inflasi di Indonesia Tahun 1998-2020 (pendekatan error correction model). *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 16(3), 619–632. <https://doi.org/10.22437/jpe.v16i3.14360>
- Naqiyya, A. N., Hidayati, N., Widamayanti, S. E., & Marwati, S. D. (2023). Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah Pengendalian Inflasi Di Indonesia Perspektif M . Umer Chapra. *Istithmar:Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 7(07), 50–65.
- Ningsih, K. (2013). Jalur Pembiayaaa Bank Syariah Dalam Mekaaisme Traasmisi Kebijakan Moneter Di Iidooesia. *Jurnal Ilmiah*.
- Nurmaida, D. (2019). Analisis Pengaruh Tingkat Inflasi, Transaksi Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS) dan Investasi Syariah terhadap Imbal Hasil Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(2), 164–186. <https://doi.org/10.32505/v3i2.1243>
- Pohan, A. (2008). *Potret Kebijakan Moneter di Indonesia (Pertama)*. PT RajaGrafindo Persada.
- Rusydiana, & Slamet, A. (2009). Mekanisme Transmisi Syariah pada Sistem Moneter Ganda di Indonesia. *Bank Indonesia : Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 345–368.
- Salim, A., Fadilla, & Purnamasari, A. (2021). Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Anggun Purnamasari. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah* , 7, 17–28.
- Turmudi, I. (2019). Kajian Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Moneter dalam Islam. *Jurnal Studi Islam*, 1(2), 74–90.
- Winarto, H., Poernomo, A., & Prabawa, A. (2021). Analisis Dampak Kebijakan Moneter terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal MANajemen Dan Sains*, 6(April), 34–42. <https://doi.org/10.33087/jmas.v6i1.216>
- Yusuf, M. (2014). Analisis Efektivitas Jalur-Jalur Transmisi Kebijakan Moneter dengan Sasaran Tunggal Inflasi di indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 1–20.